

Disaster management: a study of the Regional Disaster Management Agency of Buton District

Manajemen penanggulangan bencana: sebuah kajian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton

Waode Asmawati Ode Bau¹, Andy Arya Maulana Wijaya², L.M. Azhar Sa'ban³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

¹watiasma@gmail.com, ²andyaryamw@gmail.com, ³izharrazi@gmail.com

*Corresponding Author: izharrazi@gmail.com

ABSTRACT

Although disasters cannot be prevented, their impacts can be predicted or reduced. Considering the large potential for disasters that occur in Buton Regency, disaster prevention initiatives are very important to increase preparedness to face various types of disaster risks that may and will occur at any time. Knowing the management of the Buton Regency Regional Disaster Management Agency in dealing with disasters is one of the study objectives to be achieved. This research uses qualitative methodology. BPBD Buton Regency in implementing disaster prevention management consists of mitigation, preparedness, responsiveness and recovery stages. The mitigation stage carried out by the Buton Regency BPBD began with conducting outreach to people living in disaster-prone areas, making maps of disaster-prone areas and conducting outreach and training to the community. Preparedness carried out by BPBD Buton Regency provides information about community readiness to respond to disasters, community preparedness when facing disasters such as building emergency tents, public kitchens, and evacuating disaster victims. Buton Regency BPBD's response or responsiveness provides public complaint services regarding disaster incident reports via WhatsApp. The recovery carried out by BPBD Buton Regency is to restore the condition of the community and environment affected by the disaster by repairing and restoring all aspects with the target of normalizing people's lives in the disaster-affected area.

Keywords: Disaster Management; Mitigation; Preparedness; Response; Recovery

ABSTRAK

Meskipun bencana tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diprediksi atau dikurangi. Mengingat besarnya potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Buton, inisiatif penanggulangan bencana sangat penting untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai jenis risiko bencana yang mungkin dan akan terjadi setiap saat. Mengetahui manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton dalam menangani bencana menjadi salah satu tujuan kajian yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai acuan dalam pembahasan penelitian untuk mengetahui manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buton yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan daya tanggap, dan pemulihan. Tahap mitigasi yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Buton dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di area rawan bencana, membuat peta wilayah rawan bencana dan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Buton memberikan informasi tentang kesiapan masyarakat untuk menanggapi bencana, persiapan masyarakat bila menghadapi bencana seperti membangun tenda darurat, dapur umum, dan mengevakuasi korban bencana. Respons atau daya tanggap BPBD Kabupaten Buton memberikan pelayanan pengaduan masyarakat terkait laporan kejadian bencana melalui WhatsApp. Pemulihan yang dilakukan BPBD Kabupaten Buton untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua aspek dengan sasaran normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah terkena bencana.

Kata Kunci: Manajemen penanggulangan bencana; mitigasi; kesiapsiagaan; Daya tanggap; pemulihan

1. PENDAHULUAN

Indonesia rentan terhadap sejumlah bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, wabah penyakit, dan bencana sosial lainnya, karena letak geografis dan geologisnya (Kartiningrum & Samaloisa, 2023). Indonesia rentan terhadap bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana sosial karena kondisi geografis, demografi, sosiologis, dan sejarahnya (Wardyaningrum, 2014). Karena letak geografisnya yang beragam, Indonesia rentan terhadap berbagai macam bencana (Widjonarko, 2014).

Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, terdapat 5.400 kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2023. Kebakaran hutan dan lahan menyumbang 2.051 kejadian bencana pada tahun 2023, disusul cuaca ekstrem (1.261), banjir (1.255), tanah longsor (951), kekeringan (174), gelombang pasang/abrasi (33), gempa bumi (31), dan gunung berapi. letusan (4 peristiwa) (Rosyida et al., 2023).

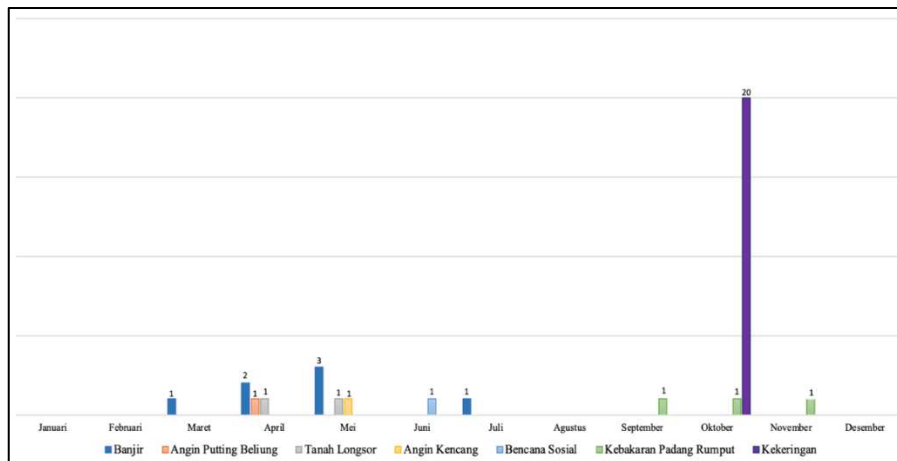
Indonesia, negara kepulauan yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sangat rentan terhadap bencana alam karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama (Manghayu, 2017). Selain itu, melimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar dengan sebaran yang tidak merata, penataan ruang yang tidak teratur, keragaman sumber daya alam, keanekaragaman hayati, suku, agama, adat istiadat, budaya, dan kelompok yang terkena dampak globalisasi menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap dampak bencana sosial dan bencana alam non-sosial (Prawira, 2021).

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang membahayakan dan mengganggu kehidupan masyarakat serta sarana penghidupannya. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia, alam, atau non-manusia, dan dapat mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan dampak psikologis (Danil, 2021). Bencana alam dan bencana non alam atau sosial merupakan dua kategori bencana yang terjadi di masyarakat. Karena seringnya terjadi gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, erosi tanah, dan tsunami, masyarakat Indonesia cenderung was-was terhadap kemungkinan terjadinya bencana (Andwitasari & Handayani, 2022). Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian non-alam, seperti wabah penyakit, epidemi, atau kegagalan teknis atau modernisasi (Nugroho et al., 2023). Selain bencana alam, peristiwa yang disebabkan oleh manusia juga mencakup ledakan nuklir, kecelakaan transportasi, kegagalan fungsi konstruksi dan teknologi, kecelakaan industri, kebakaran hutan dan lahan, polusi, dan operasi ruang angkasa. Penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat, rehabilitasi, program pencegahan bencana, dan penciptaan strategi pembangunan yang rentan terhadap bencana (Syam, 2018). Beberapa pandangan tentang bencana yang dikemukakan diatas bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, dan dampak buruk lainnya, sehingga menjadi pelajaran, tanggung jawab dan sebagai pandangan baru untuk mitigasi bencana kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait.

Salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional adalah manajemen bencana, yang mencakup sejumlah tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana (Rahmah & Ikhsan, 2022). Penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan tanggung jawab pemerintah (Zuhdi Aprizon, Yuslim, 2024). Untuk mencegah korban lebih lanjut, hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana harus dijaga dengan baik dan sesuai dengan standar layanan (Andayani & Ishak, 2020). Korban bencana harus mendapat jaminan bahwa kondisinya akan pulih dari dampak bencana, bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana akan dimasukkan dalam anggaran negara, dan bahwa dana yang cukup akan tersedia untuk pembangunan kembali dan rehabilitasi (Agus Lukman Hakim et al., 2022).

Daerah Kabupaten Buton terdapat 7 kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Pasarwajo, 2) Kecamatan Wabula, 3) Kecamatan Wolowa, 4) Kecamatan siotapina, 5) Kecamatan Lasalimu

Selatan, 6) Kecamatan Lasalimu, 7) Keramatan Kapontori. Berikut observasi yang dilakukan peneliti terhadap kasus bencana tahun 2023 yang terjadi di Kabupaten Buton:



Gambar 1. Info Bencana Kabupaten Buton Tahun 2023
Sumber: BPBD Kabupaten Buton

Tahun 2023, Kabupaten Buton dilanda bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, angin kencang, bencana sosial, kebakaran padang rumput, dan kekeringan, seperti terlihat pada gambar 1.

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Buton mempunyai potensi yang sangat sensitif terhadap bencana, oleh karena itu inisiatif penanggulangan bencana sangat penting untuk meningkatkan kesiapan terhadap berbagai risiko bencana alam yang mungkin dan akan timbul setiap saat.

2. METODE PENELITIAN

Maleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan metodologis yang menghasilkan data deskriptif, yang terdiri dari bahasa tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan menggali lebih dalam hakikat maknanya. Ketelitian dan kejelasan penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh potensi bahasa yang digunakan. Penelitian kualitatif menekankan pada faktor manusia, objek, dan institusi, serta interaksi antar komponen tersebut, untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Dengan metode kualitatif, peneliti berupaya mengkaji dan menjelaskan realitas yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Buton.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi pada kantor BPBD Kabupaten Buton. Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa peraturan daerah, artikel dan data-data lainnya yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Buton.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi dalam kerangka mitigasi, kesiapsiagaan, respons atau

daya tanggap, dan pemulihan secara kolektif disebut sebagai manajemen bencana. Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton menerapkan pola manajemen:

a) Tahap Mitigasi

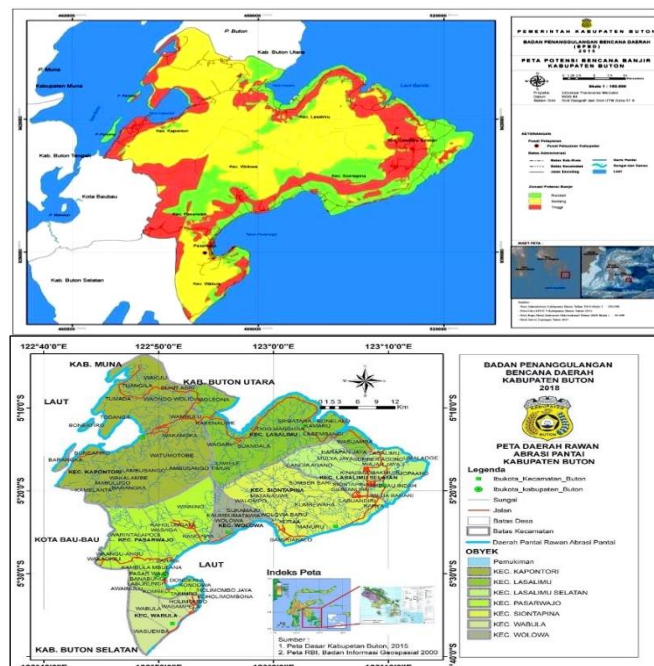
Mitigasi bencana memerlukan kesadaran masyarakat untuk mendukung inisiatif atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana sangat diperlukan agar dapat melaksanakan mitigasi sebagai salah satu solusinya. Oleh karena itu, agar setiap orang dapat mengambil bagian dalam kegiatan tanggap darurat, diperlukan kesadaran masyarakat.

Wilayah Kabupaten Buton, BPBD Kabupaten Buton melakukan sosialisasi tanggap darurat. Rangkaian kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena faktor alam, non alam maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, rusaknya harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Sejumlah inisiatif untuk mengurangi bahaya bencana dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan pembangunan fisik, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Melalui upaya mengidentifikasi risiko bencana dan membuat rencana mitigasi, mitigasi bertujuan untuk menurunkan kemungkinan dampak bencana. Masyarakat yang tadinya tidak menyadari bahwa lokasinya rawan bencana, kini sadar akan kemungkinan bahaya bencana dan lebih peduli terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Tujuan mitigasi adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Buton melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Membuat peta wilayah rawan bencana

Peta yang menunjukkan daerah rawan bencana alam atau musibah lainnya dikatakan rawan bencana. Tempat-tempat yang sering atau diperkirakan akan mengalami bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan bencana lainnya tergambar pada peta ini.

Sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampaknya, maka dibuatlah peta rawan bencana. Peta ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan rencana mitigasi bencana.



Gambar 2. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Buton

Salah satu cara untuk mengetahui sebaran ancaman bencana di Kabupaten Buton adalah dengan membuat peta wilayah rawan bencana. Peta penting sebagai landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami sebaran risiko bencana, keadaan kerentanan masyarakat di wilayah bencana. Peta ini juga berfungsi untuk menganalisis kerentanan masyarakat di lokasi bencana.

b. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bencana dan mekanisme penanggulangannya merupakan tujuan dari penyuluhan dan pelatihan bencana. Masyarakat akan dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan mitigasi bencana karena mereka lebih siap menghadapi bencana. Penyuluhan bencana dan pelatihan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Buton, yaitu:

- 1) Masyarakat dapat lebih memahami kemungkinan bahaya di lingkungannya dengan berpartisipasi dalam pendidikan bencana. Masyarakat dapat mengidentifikasi sinyal peringatan dini suatu bencana dan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap informasi tersebut. Masyarakat yang tinggal di lokasi rawan gempa, misalnya, akan lebih siap dan sadar akan apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa, seperti mencari lokasi yang aman, mengungsi dari bangunan, atau mencari perlindungan di bawah meja yang kuat.
- 2) Masyarakat diajarkan untuk melakukan tindakan mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi dampak bencana melalui pendidikan bencana. Misalnya, simulasi bencana dan pelatihan evakuasi dapat membantu individu bersiap dan merespons dengan cepat jika terjadi bencana. Selain itu, mendidik masyarakat tentang pentingnya membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa membantu menurunkan kemungkinan kerusakan dan korban jiwa.
- 3) Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih siap menghadapi keadaan darurat; mereka akan tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti memberikan pertolongan pertama, menelepon polisi, atau mencari perlindungan. Tindakan cepat dan efektif ini dapat menyelamatkan kerugian moneter dan menyelamatkan nyawa.
- 4) Pendidikan tentang kebencanaan sangat penting untuk menumbuhkan ketahanan masyarakat. Hal ini melibatkan kapasitas untuk memulihkan diri setelah bencana. Komunitas yang tangguh dapat mengelola sumber daya, menangani trauma, dan berkolaborasi dalam inisiatif pemulihan dengan lebih baik. Dalam menghadapi bencana, inisiatif pendidikan yang berkelanjutan juga dapat mendorong kolaborasi dan solidaritas warga.
- 5) Budaya persiapan bencana dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui pendidikan bencana yang teratur dan terorganisir. Karena budaya ini, setiap orang akan berjaga-jaga dan siap menangani keadaan darurat apa pun. Akibatnya, kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi aspek permanen dalam kehidupan masyarakat.

b) Kesiapsiagaan

Selain bencana yang sering terjadi tanpa pemberitahuan, kesiapan menghadapi bencana merupakan komponen keselamatan yang sangat penting dalam menghadapi bahaya bencana. Inisiatif kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana. Dengan terorganisir dan mengambil langkah-langkah yang masuk akal dan praktis, kesiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis. Oleh karena itu, masyarakat harus siap menghadapi musibah dan wajib tetap waspada setiap saat. Tentu saja masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menghadapi bencana.

Salah satu inisiatif masyarakat untuk menghadapi situasi pra-bencana adalah kesiapsiagaan masyarakat. Salah satu aspek dari kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah nilai informasi yang diberikan BPBD Kabupaten Buton kepada masyarakat secara jelas, ringkas, dan bermanfaat. Informasi tentang kesiapan juga harus diperlukan untuk menanggapi bencana, seperti pentingnya kebersihan dan tindakan yang dilakukan untuk membersihkan sungai, atau menyingkirkan pohon tumbang sebelum musim hujan dimulai. Untuk menghadapi bencana, masyarakat harus melakukan tindakan preventif seperti tidak menebang pohon sembarangan, melakukan sosialisasi dan simulasi, serta sadar lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai. Selain itu, persiapan masyarakat dalam menghadapi kegiatan pascabencana meliputi pembangunan tenda darurat, dapur umum, taman bermain ramah anak dan membantu mengevakuasi korban bencana.

Salah satu hal yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana sebelum atau sesudah terjadi adalah dengan melakukan kesiapsiagaan. Masyarakat secara rutin disosialisasikan oleh BPBD Kabupaten Buton mengenai semangat gotong royong sebelum terjadi bencana, pembuatan jalur evakuasi tempat berkumpul, dan simulasi bencana alam, termasuk persiapan dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan datangnya bencana. Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai kesiapsiagaan bencana dan menumbuhkan rasa persahabatan antar warga Kabupaten Buton jika terjadi bencana.

c) Respons atau Daya Tanggap

Sebagai pilar utama penanggulangan dan pencegahan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sebagai koordinator, sehingga BPBD harus mampu merespons bencana secara cepat dan efektif guna menangani, memitigasinya dan sangat mudah beradaptasi dalam menangani dan mengatasi bencana yang belum, sedang, dan telah terjadi.

BPBD Kabupaten Buton bertanggung jawab untuk menanggapi laporan bencana. Tindakan ini diambil BPBD sebagai respons terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pilar utama penanganan bencana di daerah Kabupaten Buton. Salah satu cara untuk mengevaluasi Dimensi Respon Masyarakat adalah dengan melihat indikasi Kemampuan Merespons Laporan Masyarakat, yang mungkin dapat menunjukkan apakah Dimensi Respons Laporan Masyarakat sudah berjalan dengan baik. Alasan mengapa laporan masyarakat ini berjalan dengan baik adalah karena mengkaji tanda-tanda kapasitas petugas dalam bereaksi terhadap laporan masyarakat. Indikasi di atas dapat dilihat dari beberapa hal, termasuk tindakan BPBD Kabupaten Buton dalam memudahkan pelaporan kejadian bencana.

Melaporkan kejadian bencana untuk memantau seberapa baik BPBD Kabupaten Buton menangani kebutuhan dan tujuan masyarakat sehubungan dengan bencana tersebut. Untuk membantu masyarakat melaporkan bencana tanpa harus mendatangi kantor BPBD Kabupaten Buton, pihaknya menyediakan sejumlah titik akses. Media grup *WhatsApp* sudah memperbolehkan masyarakat untuk melaporkan bencana yang terjadi. Masyarakat yang terkena dampak bencana dapat menerima bantuan yang cepat dan efektif dari BPBD Kabupaten Buton dalam penanggulangan bencana.

d) Pemulihan

Serangkaian tindakan untuk memperbaiki keadaan lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak bencana dikenal dengan istilah pemulihan bencana. Tahap pemulihan merupakan salah satu tahapan dalam penanganan bencana. Pemulihan adalah proses pemulihan infrastruktur, mata pencaharian, dan kualitas hidup di wilayah yang terkena dampak bencana. Tinggal di daerah yang terkena dampak bencana, termasuk inisiatif untuk menurunkan faktor risiko bencana. Tahap pemulihan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen bencana.

Fase berikutnya, yang merupakan fase pemulihan terpenting untuk menentukan hasil jangka panjang dari pemulihan pascabencana, dimulai ketika kebutuhan mendesak penduduk telah terpenuhi, semua bantuan medis tersedia, dan masyarakat sudah tenang dari kekacauan yang terjadi karna bencana. Pada fase ini, para penderita mulai memahami pentingnya kerugian yang mereka alami dan sepenuhnya memahami dampak bencana.

Setelah pulih secara fisik dan psikologis dari trauma, para korban yang sebelumnya tinggal di kamp atau pengungsian bersama korban lainnya menyadari perlunya kembali ke rutinitas sehari-hari. Untuk hidup kembali seperti sebelum bencana terjadi. Mereka memerlukan fasilitas dan sumber daya selama periode ini sehingga mereka dapat kembali ke rumah mereka dan mengejar karir serta menghidupi diri mereka sendiri, terutama karena bantuan pemerintah dan organisasi non-pemerintah mempunyai batas waktu. Akibatnya, mereka ditempatkan di lingkungan baru dan harus mampu menjalani kehidupan normal atau hampir normal selama fase rehabilitasi. Pasca bencana, tahap rehabilitasi seringkali terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti membantu para korban dalam mencari, memperbaiki atau membangun kembali tempat tinggal baru, memulihkan layanan-layanan penting yang terganggu, dan menghidupkan kembali serta mengaktifkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak.

4. KESIMPULAN

Manajemen penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Buton secara garis besar telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 1) Tahap mitigasi, mitigasi yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Buton dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di area rawan bencana, membuat peta wilayah rawan bencana dan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, 2) Kesiapsiagaan, rangkaian kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Buton memberikan informasi tentang kesiapan masyarakat untuk menanggapi bencana, persiapan masyarakat bila menghadapi bencana seperti membangun tenda darurat, dapur umum, dan mengevakuasi korban bencana. 3) Respons atau daya tanggap, BPBD Kabupaten Buton memberikan pelayanan pengaduan masyarakat terkait laporan kejadian bencana melalui *WhatsApp*, 4) pemulihan. BPBD Kabupaten Buton untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua aspek dengan sasaran normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah terkena bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton yang telah memberikan keterangan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Lukman Hakim, Ade Hadiono, Ipah Mulyani, Jumanah, Natta Sanjaya, & Destiana. (2022). Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Untuk Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 367–373. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.100>
- Andayani, H., & Ishak, S. (2020). Manajemen Pelayanan Kesehatan pada Pengungsi Pasca Bencana. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(3), 23–29.
- Andwitasari, N., & Handayani, B. L. (2022). Mengapa Masyarakat Indonesia Lemah dalam Menghadapi Ancaman Bencana. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 4(2), 150–162.
- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. *Universitas Dharmawangsa, November*, 7–14. <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/viewFile/2/25>
- Kartiningrum, B., & Samaloisa, R. (2023). Pemetaan Potensi Bencana dan Sumberdaya Pendukung Program Kampung Siaga Bencana Kalurahan Condongcatut. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4548–4561. <https://journal->

- nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2197%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/2197/1803
- Maleong, L.J. (2017). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manghayu, A. (2017). Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat. *Manajemen Bencana*, 2008, 3.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Nugroho, S. S., Pasaribu, D., Fadiyah, D., & Andini, L. A. (2023). Tata Kelola Bencana Non Alam Di Indonesia: Temuan Awal. *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(1), 13–26. <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Prawira, N. G. A. (2021). Kriteria Penentuan Kawasan Evakuasi Bencana Non-Alam dan Bencana Sosial sebagai Upaya Mitigasi. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(2), 73–150. <https://doi.org/10.51172/jbmb>
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.776>
- Rosyida, A., Aziz, M., Firmansyah, Y., Setiawan, T., Pangesti, K. P., & Kakanur, F. (2023). Buku Data Bencana Indonesia 2023. *Buku Data Bencana Indonesia*, 3, 3–11.
- Syam, F. (2018). Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana Dan Pendekatan Mazhab Antropisentris. *Subtantia*, 20(11), 49–65.
- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM*, 2(3), 179. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i3.69>
- Widjonarko, H. B. W. (2014). Pemetaan Potensi Bencana Longsor Di Kelurahan Kembang Arum. *Geoplaning: Journal of Geomatics and Planning*, 1(2), 93–101. <https://doi.org/10.14710/geoplaning.1.2.93-101>
- Zuhdi Aprizon, Yuslim, K. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 54–74. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1849>